

## IMPLEMENTASI E-MASTER PADA MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIIL NEGARA PROVINSI JAWA TIMUR

Fierda Nurany<sup>1</sup>, Ryan Adhi<sup>2</sup>, Dimas Putra<sup>3</sup>, Efrida Rahayu<sup>4</sup>, Fakhrusy Syakirin<sup>5</sup>, Anita Mulyono<sup>6</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Bhayangkara Surabaya

fierdanurany@ubhara.ac.id<sup>1</sup>, ryanadhi321@gmail.com<sup>2</sup>, dimasputra313@gmail.com<sup>3</sup>,  
efridarahayu19@gmail.com<sup>4</sup>, ceguvara583@gmail.com<sup>5</sup>, anitamol23.am@gmail.com<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Di Indonesia perkembangan *E-Government* telah diamanatkan oleh pemerintahan melalui Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut pengembangan *E-Government* ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien di berbagai sektor publik. Di Jawa Timur penerapan konsep *E-Government* sendiri sudah tidak asing lagi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan meluncurkan program Master atau Manajemen ASN Terpadu Elektronik atau *E-Master* yang merupakan aplikasi *one for all* atau satu untuk semua, selain kelengkapan data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat di dalamnya, aplikasi ini juga berisikan menu layanan kepegawaian *online*. Dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pelayanan *paperless*, sehingga dapat memangkas alur birokrasi, proses pelayanan lebih cepat dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Rochman Firmansyah dan Fitrotun Niswah dengan judul “Inovasi Pelayanan *E-Master* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur” penelitian ini melihat perkembangan pelayanan *E-Master* Provinsi Jawa Timur menggunakan teori 5 (Lima) Faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthews dan Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013) yang meliputi Kepemimpinan, Manajemen atau Organisasi, Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia dan Teknologi. Lima indikator yang telah dicapai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim adalah Pertama, *Indikator Kepemimpinan*. Kedua, *Indikator Manajemen atau Organisasi*. Ketiga, *Indikator Manajemen Resiko*. Keempat, *Indikator Sumber Daya Manusia*. Kelima, *Indikator Teknologi* yang digunakan dalam pelayanan.

**Kata kunci :** *IPTEK, Government, MSDM, E-Master*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah terus didorong untuk berinovasi mengoptimalkan kinerja pemerintah dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai bagian dari upaya pelayanan publik yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi di era digital bergerak begitu cepat dan mengubah perilaku manusia hampir di setiap aspek kehidupan.

Pemerintah telah sadar dengan melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem *E-Government* untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Sistem *E-Government* merupakan sistem aplikasi pemerintahan yang saling terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi IT. Fungsi *E-Government* untuk dapat meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar bisa terbentuk pemerintahan yang baik. *E-Government* dikembangkan untuk membentuk jaringan system manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.

Di Indonesia perkembangan *E-Government* telah diamanatkan oleh pemerintahan melalui Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut pengembangan *E-Government* ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien diberbagai sektor publik. Di Jawa Timur penerapan konsep *E-Government* sendiri sudah tidak asing lagi. Salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang menerapkan *E-Government* dalam mengatur para pegawainya adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Manajemen sumber daya aparatur adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi pemerintahan. Manajemen sumber daya aparatur juga menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenaga kerjaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Jawa Timur yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan meluncurkan program Master atau Manajemen ASN Terpadu Elektronik atau *E-Master* sebagai bentuk kemudahan pelayanan terhadap pegawai.

*E-Maste* radalah aplikasi *oneforall* atau satu untuk semua, selain kelengkapan data pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat didalamnya, aplikasi ini juga berisikan menu layanan kepegawaian *online*. Dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pelayanan *paperless*, karena semua data kepegawaian dan jenis pelayanannya telah terintegrasi dalam satu aplikasi berbasis teknologi informasi yang terhubung dalam jaringan internet. Sehingga dapat memangkas alur birokrasi, proses pelayanan lebih cepat dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Permasalahan yang muncul sebelum adanya program *E-Master* diantaranya kurang efektif serta efisien dalam memberikan pelayanan, namun setelah adanya layanan *online* ini sangat cepat. Contohnya adalah layanan izin belajar. Jika sebelumnya ASN yang ingin mendapat layanan ini membutuhkan waktu berhari-hari, kini hanya satu jam bisa selesai jika persyaratannya lengkap. Begitu pula dengan mutasi dari luar provinsi. ASN yang ingin masuk menjadi ASN pemprov, cukup mengisi secara *online*. Jika sudah memenuhi persyaratan dan diizinkan, maka ASN yang bersangkutan baru datang ke pemprov untuk mengikuti tes dan memenuhi persyaratan lainnya. Sehingga ASN tersebut tidak perlu bolak-balik mengurus berkas secara manual. Implementasi *E-Master* pada manajemen sumber daya aparatur sipil negara menarik untuk dikaji. Sehingga berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan *E-Master* pada manajemen sumber daya aparatur sipil Negara provinsi Jawa Timur.

## PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting bagi organisasi. Tanpa adanya unsur manusia sebagai pegawai, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai seperti apa yang diharapkan. Berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sangat tergantung pada unsur manusia yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Di dalam konteks pemerintahan, maka pegawai merupakan alat penggerak segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan. Peran pegawai negeri sipil sangat penting karena akan menghasilkan *public goods* dan *services* terhadap masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Miftah Thoha (1983: 16):

“Bahwa tujuan apapun yang digariskan oleh setiap organisasi, berhasil tidaknya tujuan tersebut dicapai, tergantung langkah permulaannya yakni penataan tenaga kerja manusia. Tanpa usaha-usaha penataan tenaga kerja manusia ini, organisasi tidak akan dapat mencapaitujuannya.”

Pentingnya peran pegawai dan pengelolannya membuat pengelolaan SDM/aparatur menjadi salah satu isu strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Apabila dulu Bagian Kepegawaian baik di Propinsi ataupun Kabupaten/Kota hanyalah sekedar berfungsi administratif, tanpa memiliki kewenangan penentuan/perencanaan pegawai di daerah. Saat ini sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Bagian Kepegawaian di Kabupaten/Kota bertambah fungsi dan kewenangannya dalam mengelola urusan kepegawaian didaerahnya. Kemudian Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 34A menegaskan: “Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di bentuk

Badan Kepegawaian Daerah” (Pasal 34 A ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian).

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN juga semakin diperlukan sebuah Sistem Informasi ASN yang merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya saat ini ada tiga hal yang menjadi fokus utama dalam manajemen ASN, yakni pelayanan umum administrasi kepegawaian, peningkatan potensi dan kompetensi, serta peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN. Dalam penyelenggaraannya, *e-government system* mengacu pada dua hal yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan. Melihat keberhasilan tersebut dapat dipahami bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim telah berhasil mewujudkan *E-Government* melalui aplikasi *E-Master* sehingga membentuk jaringan system manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Melihat betapa pentingnya peran SDM Aparatur sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan yang pada masa kini dituntut lebih peka menghadapi perkembangan globalisasi, karena tersedianya aparatur yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi menjadi sesuatu yang sangat menentukan dan mendesak untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim mempermudah memberikan akses pelayanan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem informasi elektronik Manajemen ASN Terpadu (*E-Master*) semua data ASN *by name by*

*address* tercover dalam *E-Master* dan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi android. Sehingga semua pelayanan mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala dan sebagainya akan terlayani secara *online*.

Dalam memberikan pelayanan kepegawaian, BKD Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pelayanan *paperless*, karena semua data kepegawaian dan jenis pelayanannya telah terintegrasi dalam satu aplikasi berbasis teknologi informasi yang terhubung dalam jaringan internet. Sehingga dapat memangkas alur birokrasi, proses pelayanan lebih cepat dan dapat diakses kapan saja maupun dimana saja. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengakses dan memperbarui data kepegawaiannya.



**Gambar 1 Halaman Utama Login**  
(<https://gunawansusilo64.wordpress.com/2017/01/30/layanan-personal-master-prov-jatim-asn/>)

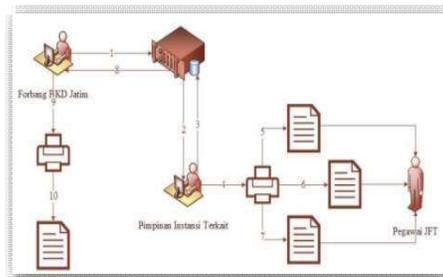


**Gambar 2 Halaman Utama Dashboard**  
[\(https://gunawansusilo64.wordpress.com/2017/01/30/layanan-personal-master-prov-jatim-asn/\)](https://gunawansusilo64.wordpress.com/2017/01/30/layanan-personal-master-prov-jatim-asn/)

Pada Gambar 1 menunjukkan halaman *login*, halaman ini merupakan halaman yang awal yang ditampilkan kepada *user*. Setiap user didaftarkan oleh admin sehingga, *user* menerima *username* dan *password* yang diberikan oleh admin. Untuk dapat masuk ke halaman utama *dashboard*, *user* yang terdaftar harus melakukan proses *login* melalui halaman ini. Pengguna hanya perlu menginputkan *username* dan *password*. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi dari data pengguna yang telah dimasukkan. Kemudian pada gambar 2 menunjukkan halaman utama *dashbord*, dimana didalamnya terdapat berbagai menu layanan yang diberikan untuk memudahkan ASN.

Pada aplikasi *E-Master* ini menjalankan manajemen berbasis sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Sistem merit dapat terlaksana dengan baik karena *database* kepegawaian lengkap, *valid*, *up to date* dan terintegrasi. Kemudian di dalam *e-master* ada menu manajemen karier, yang di dalamnya terdapat data hasil *assessment* dan dapat dilihat kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PNS, serta memiliki fitur layanan dan laporan kepegawaian dan

fungsi analisis perencanaan dan pengembangan ASN. Dalam satu aplikasi sudah terdapat banyak pelayanan kepegawaian yang mudah diakses sehingga dapat memangkas alur birokrasi, proses pelayanan lebih cepat dan dapat diakses kapan saja maupun dimana saja. Gambar 3 dibawah ini menunjukkan alur sistem penilaian kinerja.



**Gambar 3 Alur Sistem Penilaian Kinerja**  
<https://media.neliti.com/media/publications/250106-rancang-bangun-aplikasi-penilaian-kinerj-8b23bc18.pdf>

Mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Rochman Firmansyah dan Fitrotun Niswah dengan judul “Inovasi Pelayanan E-Master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur” penelitian ini melihat perkembangan pelayanan E-Master Provinsi Jawa Timur menggunakan teori 5 (Lima) Faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthews dan Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013) yang meliputi Kepemimpinan, Manajemen atau Organisasi, Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia dan Teknologi. Lima indikator yang telah dicapai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim adalah Pertama, Indikator Kepemimpinannya standar dari pemimpin yang ada di BKD Jawa Timurmotivasi pemimpin sangat penting bagi bawahan agar muncul ide kreatif inovasi. Kedua, Indikator Manajemen atau Organisasi yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur dan PT. Telkom.

Ketiga, Indikator Manajemen Resikoterhadap manajemen terhadap masalah yang muncul pada server down sehingga mengakses program e-Master kecepatannya melambat bahkan tidak dapat login. Keempat, Indikator Sumber Daya Manusia, pegawai dalam menangani E Master berasal dari Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Infomasi. Kelima, Indikator Teknologiyang digunakan dalam pelayanan adalah aplikasi Web Based Application tanpa melakukan penginstalan komputer.

Dalam memberikan pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim terus berusaha memaksimalkan layanan E-Master untuk membantu kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar dapat berjalan optimal walaupun sedang dalam kondisi seperti saat ini di tengah berbagai pembatasan di masa pandemi COVID-19. Melalui E-Master, berbagai layanan kepegawaian tetap dapat berjalan optimal di tengah berbagai pembatasan yang tengah diterapkan Pemprov Jatim. Termasuk diantaranya pemberlakuan satu hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja di rumah (Work From Home) yang telah berjalan sejak 23 Maret lalu berdasarkan SE Gubernur Jatim Nomor 800 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pemprov Jatim.

E-Master telah memberi berbagai manfaat bagi layanan kepegawaian. Mulai dari sarana informasi data ASN hingga sistem layanan manajemen kepegawaian. Tak kurang dari 7.204 ASN yang berhasil dilayani proses kenaikan pangkatnya selama periode April 2020. Layanan tersebut secara rinci dilakukan untuk 3.603 pegawai Pemprov Jatim dan 3.601 pegawai pemkab / pemkot se-Jatim. Atas pencapaian tersebut, Jatim menjadi provinsi tertinggi secara Nasional dalam melaksanakan memberikan layanan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Implementasi program layanan E-Master pada Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan berhasil karena memberi manfaat atau kemudahan layanan mulai dari sarana informasi data ASN hingga sistem layanan manajemen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Manfaat atau kemudahan layanan pada sarana informasi data ASN dalam memberikan akses pelayanan seperti proses pelayanan lebih cepat dan dapat diakses kapan saja maupun dimana saja. Dalam satu aplikasi sudah terdapat banyak pelayanan kepegawaian yang mudah diakses dengan menjalankan manajemen berbasis merit dan paperless sehingga semua data kepegawaian maupun jenis pelayanannya terintegrasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar serta dapat memangkas alur birokrasi. Sistem informasi E- Master semua data ASN by name by address tercover dan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi android. Sehingga semua pelayanan kenaikan pangkat, gaji berkala dan sebagainya akan terlayani secara online. Sistem ini berisi database kepegawaian lengkap, valid, up to date, dan terintegrasi. BKD Jatim telah berhasil menerapkan sistem E- Government dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih cepat, efisien, dan transparan apalagi di masa pandemi Covid-19 ini dimana pemerintah menghimbau agar mengurangi kegiatan diluar rumah dan supaya bekerja di rumah saja. Melalui aplikasi E- Master segala pelayanan kepegawaian dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka dan melalui proses yang rumit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Peraturan Perundang – Undangan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 34A

#### B. Sumber Non Buku

Hasniati. 2010. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Sebuah Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik. PKP2A II LAN Makassar

Rochman, Niswah. 2017. Inovasi Pelayanan E-Master di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian. Universitas Negeri Surabaya

<http://bkpsdmd.tanjatimkab.go.id/?show=artikel-detail&id=119> diakses pada 2 Mei 2020

<https://deloge.de/info/2118fc7/dengan-aplikasi-e-master-asn-jatim-bisa-lakukan-- bkd-jatim> diakses pada 17 Mei 2020

<https://gunawansusilo64.wordpress.com/2017/01/30/layanan-personal-master-prov-jatim-asn/> diakses pada 3 Juni 2020

<https://surabaya.bisnis.com/read/20170417/531/761591/bkd-jatim-mengenalkan-manajemen-asn-terpadu-elektronik> diakses pada 17 Mei 2020

<https://www.antaranews.com/berita/1481517/bkd-jatim-maksimalkan-e-master-bantu-asn-di-masa-covid-19> diakses pada 2 Mei 2020

<https://www.harianbhirawa.co.id/bkd-jatim-permudah-layanan-kepegawaian-melalui-e-master/> diakses pada 2 Mei 2020

<https://www.harianbhirawa.co.id/optimalkan-e-master-layanan-kepegawaian-jatim-berjalan-maksimal-selama-covid-19/> diakses pada 17 Mei 2020

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dorong-kemajuan-sakip-menteri-panrb-apresiasi-gubernur-jatim> diakses pada 17 Mei 2020